



Pergantian OPD dan Pemeriksaan BPK

Penyebab Molornya Kegiatan Fisik Dinas PUTRPK

Bangli (Bali Post) -

Sorotan Komisi III DPRD Bangli terkait kinerja pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPK) selama sembilan bulan terakhir, ditanggapi Kabid Bina Marga Dinas PUTRPK Putu Widagunawan. Dia mengatakan, kegiatan fisik di Dinas PUTRPK sejatinya sudah mulai dikerjakan sejak Januari. Hanya pengerjaannya sempat molor karena adanya pergantian OPD, bencana alam hingga pemeriksaan BPK.

Kepada *Bali Post*, Selasa (24/10) kemarin, Widagunawan mengatakan saat proses pengerjaan proyek terjadi pergantian OPD yang menyebabkan nama dinas berubah. Hal itu pun memerlukan waktu untuk penyesuaian. Kemudian pada Februari, kegiatan di Dinas PUTRPK juga terhambat akibat bencana alam di Kintamani. "Semua staf saat itu terfokus ke sana," ujarnya.

Setelah bencana berakhir, kegiatan kembali terhambat karena adanya pemeriksaan

BPK terkait aset. Atas petunjuk BPK yang disampaikan ke Inspektorat, Dinas PUTRPK diminta melengkapi sejumlah hal. Proses ini memakan waktu hingga tiga bulan lebih. "Sehingga setelah itu, di bulan Agustus baru kegiatan bisa berjalan," terangnya.

Terkait persentase realisasi kegiatan fisik yang 26 persen itu, Widagunawan mengatakan hal tersebut merupakan perhitungan menyeluruh di beberapa bidang di Dinas PUTRPK. Khusus

di Bidang Bina Marga, realisasi kegiatan fisik sudah mencapai 54,76 persen, sementara realisasi keuangannya 55,7 persen.

Widagunawan juga menjelaskan kegiatan yang bersumber dari DAK selama ini sudah dikerjakan. Sesuai ketentuan, pelaporan realisasi untuk pengamprahan sudah dilakukan 21 Oktober lalu, sehingga dipastikan pengamprahan tidak hangus. "DAK itu kami bisa selesaikan sampai menjelang akhir tahun 2017," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Bangli mempertanyakan kinerja pejabat Dinas PUTRPK. Pasalnya, hingga memasuki pertengahan Oktober, realisasi kegiatan fisik di dinas tersebut masih sangat rendah yakni baru mencapai 26 persen.

Anggota Komisi III DPRD Bangli Made Sudiasa saat ditemui usai menggelar rapat kerja dengan Dinas PUTRPK, Senin (23/10), mengungkapkan semestinya dalam jangka waktu sembilan bulan yakni dari Januari hingga September, kegiatan fisik yang didanai DAK sudah tuntas dilaksanakan. Akan tetapi kenyataannya, realisasi kegiatan fisik yang ditangani dinas tersebut hanya 26 persen. Tak hanya

itu, realisasi keuangannya juga sangat minim yakni hanya 19 persen.

Sudiasa mengungkapkan, dalam rapat kerja yang digelar sebelumnya, pihak Dinas PUTRPK selalu menjanjikan kegiatan fisik segera dilaksanakan. Bahkan sempat dijanjikan kegiatan berjalan pada Agustus. "Tapi nyatanya, sekarang realisasinya baru 26 persen," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Ketut Suastika mengatakan, sesuai ketentuan, untuk mengamprah DAK yang kedua, harusnya realisasi kegiatan sudah tuntas 21 Oktober lalu. Dia pun meminta Bupati memberikan penilaian khusus pada pejabat di Dinas PUTRPK jika terus-terusan seperti ini. (kmb40)

Edisi : Rabu, 25 Oktober 2017

Hal : 10



Pengamanan Pilkada 2018 Dianggarkan Rp 10 Miliar

Polres Lakukan Sejumlah Persiapan

Gianyar (Bali Post) -

Polres Gianyar mulai melakukan persiapan pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018. Guna melaksanakan tugas tersebut, disiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. "Anggaran pengamanan proses pemilu dari pemerintah daerah sudah ketok palu," ungkap Kapolres Gianyar AKBP Djoni Widodo saat ditemui di ruang Rupatama Mapolres Gianyar, Kamis (26/10) kemarin.



Bali Post/nik
AKBP Djoni Widodo

Djoni mengatakan, jajarannya sudah merancang plot untuk penyerapan anggaran tersebut. Terkait penggunaan anggaran, pihaknya juga sudah intens berkoordinasi dengan Polda Bali hingga BPK. "Kita juga akan studi banding ke tiga Polres yang sebelumnya menyelenggarakan pilkada untuk lebih memantapkan penggunaan anggaran," ucapnya.

Dijelaskannya, anggaran itu akan digunakan untuk pengamanan di setiap tahapan pilkada 2018. Jika anggaran tersebut tersisa atau tidak digunakan, kepolisian akan melakukan pengembalian ke pemerintah daerah. Kapolres juga sudah mulai menyiapkan pembagian personel Polres Gianyar untuk

pengamanan pilkada, sehingga pelayanan publik lainnya diharapkan tidak sampai terganggu.

"Paling tinggi biasanya pengamanan saat kampanye, karena ini rentang waktunya kurang lebih sampai tiga bulan. Saat H-1 kita juga akan melibatkan Linmas, pekalang termasuk rekan di TNI," ujarnya.

Pendeteksian kawasan dengan kerawanan keamanan saat pilkada telah dilakukan. Namun untuk lebih memastikannya, Djoni menyatakan pihaknya masih menunggu penetapan TPS di seluruh kabupaten. "Nanti akan ada klasifikasi kerawanan tingkat 1, 2 dan 3. Yang jelas kita tidak bisa hanya berpatokan pada pilkada sebelumnya, karena

pasti ada perubahan untuk pilkada yang akan datang, semisal jumlah TPS," jelasnya.

Guna meminimalisir benturan di masyarakat jelang pilkada, Kapolres menginstruksikan tujuh Kapolsek di Gianyar untuk lebih intens berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. "Saya perintahkan Kapolsek agar lebih banyak ke luar menyambangi tokoh agama, tokoh pemuda. Jangan sebagai Kapolsek hanya di ruangan," ucapnya.

Sementara terkait keributan yang kini kerap terjadi di media sosial jelang pilkada, Djoni menyatakan jajarannya sudah menyiapkan personel untuk patroli cyber. "Kalau ada yang ditemukan melanggar, pasti Reskrim segera bergerak. Nanti kan bisa

diancam UU ITE," tegasnya. Sementara itu, Kasat reskrim Polres Gianyar AKP Marzel Doni menambahkan, untuk penanganan pelanggaran di dunia maya pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Polda Bali. Di Polres Gianyar sudah ada Unit IV Sat Reskrim yang menangani tindak pidana tertentu (tipiter). "Kalau ada kami temukan, pasti segera diproses oleh Unit Tipiter," ungkapnya. (kmb35)

Edisi : Jumat, 27 Oktober 2012
Hal : 9



Soal Kasus Korupsi Retribusi Terminal Manuver

Kerugian Negara Rp 400 Juta, Tersangka Kembalikan Rp 42 Juta

Negara (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana saat ini masih terus dalam penyidikan. Sejauh ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni inisial ND. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat itu bertugas di Terminal Manuver mengaku hanya menikmati uang hasil korupsi senilai Rp 42 juta. Untuk itu, tersangka pun mengembalikan uang itu. Sementara pengakuan tersangka itu tidak sesuai dengan kerugian negara senilai Rp 400 juta lebih.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan saat dikonfirmasi, Kamis (26/10) kemarin, membenarkan adanya pengembalian uang dari tersangka tersebut. Penyidik sebelumnya juga telah memberikan kesempatan kepada tersangka untuk kooperatif dan mengembalikan uang kerugian negara. Dari penghitungan oleh tersangka, jumlah uang yang dinikmati diakui sebanyak yang dikembalikan.

Walaupun tersangka melakukan pengembalian uang kerugian negara, hal tersebut menurutnya tidak menghapus status tersangka, apalagi penghentian penyidikan. "Penyidikan tetap berjalan," terangnya. Tindakan tersangka ini nantinya dapat menjadi pertimbangan hakim

dalam memutuskan kasus ini. Hasil penghitungan jumlah kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 400 juta lebih.

Selain tersangka, uang ini juga dinikmati oleh pihak-pihak lain. Karena itu kasus ini berpotensi menjerat tersangka lainnya. Tim penyidik saat ini juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi secara intensif. "Kemungkinan tersangka lain ada," ucap Pasek.

Dari pemeriksaan, ada dugaan korupsi retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah tahun 2016. Apalagi diketahui tiket dan uang yang disetorkan ke kas daerah tidak sesuai sehingga ada selisih. Diperkirakan selama setahun ada kerugian negara hingga Rp 400 juta lebih. (kmb26)

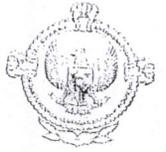


Made Pasek Budiawan

Bali Post/olo

Edisi : Jumat, 27 October 2017

Hal : 2



Pengembangan Kasus Korupsi LDPM Tulikup

Kejari Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana Kelompok PUAP

Gianyar (Bali Post) -

Kasus korupsi penyimpangan dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Desa Tulikup yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, memasuki tahap II, Rabu (22/11) kemarin. Kasus dengan tersangka Dewa Putu Suartana ini diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar. Dari pengembangan kasus ini, Kejari kini menelusuri dugaan penyelewengan dana di Kelompok Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Desa Tulikup.

Kasi Pidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyidikan, jajarannya akhirnya menuntaskan kasus yang menyeret mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Tulikup Dewa Putu Suartana. "Makanya sekarang kita lakukan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejari ke Jaksa Penuntut Umum," katanya.

Tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 70 juta itu dipasangkan pasal primer, Pasal 2 jo. Pasal 18 UU Tipikor, subsidier Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. "Setelah

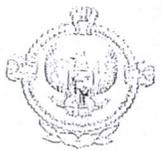
diperiksa kembali kurang lebih 30 menit, tersangka oleh JPU lantas ditahan di tingkat penuntutan selama 20 hari di Rutan Gianyar," ucapnya.

Berhasil menuntaskan kasus ini, ternyata tidak membuat Kejari Gianyar berhenti. Endra Arianto menyebut pihaknya kini membidik Kelompok PUAP Desa Tulikup. Kelompok ini juga diduga melakukan penyelewengan dana mencapai puluhan juta rupiah. "Kalau yang ini, kasusnya diduga pengadaan sarana pertanian," ucapnya.

Pihaknya bahkan yakin bisa menyeret tersangka dalam kasus ini. Namun, karena masih penyelidikan, ia menyarankan agar pihak terkait segera melakukan pengembalian dana. "Kita persilakan dulu mereka melakukan pengembalian. Kalau belum juga, ya kita bawa ini masuk ke penyidikan. Kalau sudah penyidikan, ya tidak ada kompromi," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Kamis, 23 Nov 2012

Hal : 9



Sidang Dugaan Korupsi Keuangan Desa Mengwitani Jaksa Hadirkan Lima Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Sidang kasus dugaan korupsi keuangan Desa Mengwitani dengan terdakwa bendahara Ni Wayan Nestri, Selasa (21/11) kemarin, dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. JPU Wayan Suardi di depan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, menghadirkan lima orang saksi. Mereka adalah I Made Muriana selaku Sekdes Mengwitani, Ni Kadek Parwati (Kaur Umum), I Made Sumitra (Kaur Bidang Pembangunan), Gusti Ngurah Ketut Putra (LPM) dan I Putu Wendra (BPD).

Dalam sidang kemarin, yang paling banyak ditanya hakim dan jaksa adalah Sekdes dan BPD. Kedua orang tersebut dinilai mengetahui persoalan tersebut, karena Sekdes

sebagai rohnya di pemerintahan desa dan BPD selaku pengawas jalannya pemerintahan, termasuk soal pembangunan yang menggunakan anggaran keuangan desa.

Saksi Muriana mengatakan, pihaknya mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana keuangan desa setelah terjadi pemeriksaan dari tim tipikor dan BPKP. Di tahun 2014 itu, diduga ada indikasi penyimpangan keuangan.

Jaksa mencoba ke pokok persoalan, yakni soal dana desa yang mestinya tersisa Rp 1,2 miliar yang merupakan sisa pemakaian tahun-tahun sebelumnya. Ketika ditanya komponen dana Rp 1,2 miliar itu, saksi lain ada mengatakan seperti kegiatan BKK. Mestinya, kata jaksa ada Silpa.

Namun, buktinya uang di rekening tidak ada. Dari Rp 1,2 miliar yang tersisa hanya Rp 3 jutaan.

Siapa yang paling bertanggung jawab? Saksi mengatakan biasanya bendahara keuangan. Hal menarik disampaikan saksi Kaur Pembangunan saat ditanya realisasi pembangunan 2014. Kala itu, Desa Mengwitani memasang batu sikat dan memasang paving di pura. Anggarannya mencapai Rp 700 jutaan. Namun, setelah pemavingan dan batu sikat selesai, ada kekurangan pembayaran Rp 78 juta.

Hal senada dikatakan saksi BPD. Dari Rp 1,2 miliar, sisa dana hanya sekitar Rp 3 jutaan. Sehingga, turun petugas BPKP dan Tipikor. "Semua data diambil tipikor," ujar saksi. (kmb37)

Edisi : Rabu, 22 Nov 2017

Hal : 2